

ABSTRAK

Afrika Selatan merupakan sumber perdagangan manusia, negara transit, dan negara tujuan untuk perdagangan manusia, terutama perempuan yang direkrut untuk eksploitasi seks komersial. Sejumlah kasus perdagangan manusia mengalir ke Afrika Selatan, melalui beberapa aliran baik perdagangan dari luar Benua Afrika menuju ke Afrika Selatan; dari dalam Benua Afrika; maupun perdagangan dalam negeri, dalam batas-batas nasional Afrika Selatan. Dalam rangka mengurangi kasus *human trafficking* di Afrika Selatan, maka Pemerintah Afrika Selatan perlu untuk mengadakan kerjasama. Pilihan Afrika Selatan untuk melakukan kerjasama dengan meninjau kepada kasus-kasus yang ada dimana sebagian besar korban *human trafficking* berasal dari Eropa. Oleh karena itu, maka Pemerintah Afrika Selatan memilih untuk kerjasama dengan Uni Eropa, dapat dianggap sebagai representatif dari bangsa-bangsa Eropa. Kerjasama ini merupakan bagian dari Strategi Nasional Afrika Selatan untuk memerangi perdagangan manusia, yang dikenal sebagai "*Tsireledzani*". Program kerjasama ini dilaksanakan oleh *National Prosecuting Authority* (NPA) Afrika Selatan dari tahun 2006-2010. Kerjasama Pemerintah Afrika Selatan dengan Uni Eropa ini, di dalam memerangi perdagangan manusia di Afrika Selatan yaitu dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat Afrika Selatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan manusia, mengembangkan kerangka kerja nasional di antara pejabat yang terkait untuk mencegah, menghukum dan memberantas perdagangan manusia baik melalui pembentukan undang-undang maupun pembentukan lembaga yang terkait dengan perdagangan manusia. Sebuah inisiatif kunci dalam memerangi perdagangan manusia adalah pengembangan kerangka kerja legislatif nasional yang efektif. Untuk alasan ini proses reformasi legislatif di Afrika Selatan perlu dilakukan untuk membawa hukum nasionalnya sesuai dengan standar anti-perdagangan manusia yang ditetapkan dalam Protokol Palermo untuk merespons perdagangan manusia.

Kata kunci : Pemerintah Afrika Selatan, Perdagangan Manusia, Afrika Selatan, Uni Eropa, Protokol Palermo, *Tsireledzani*, memberikan pengetahuan, pembentukan undang-undang

ABSTRACT

South Africa is the source of human trafficking, transit, and destination country for trafficking in persons, especially women who were recruited for commercial sexual exploitation. A number of cases of human trafficking flows to South Africa, through some good flow of trade from outside the African continent toward South Africa; of the African continent; as well as domestic trade, within the boundaries of the South African national. In order to reduce cases of human trafficking in South Africa, the South African Government needs to establish cooperation. South Africa's selection to cooperate with reviewing the cases there is where most of the victims of human trafficking come from Europe. Therefore, the Government of South Africa opted for cooperation with the EU, can be considered as representative of the peoples of Europe. This cooperation is part of the South African National Strategy to combat human trafficking, which is known as "Tsireledzani". This joint program implemented by the National Prosecuting Authority (NPA) of South Africa from 2006-2010. Cooperation between the Government of South Africa to the European Union, in combating human trafficking in South Africa is to provide knowledge to masyarakat South Africa on matters relating to human trafficking, to develop a national framework of the officials concerned to prevent, punish and eradicate human trafficking through the establishment of law and the establishment of institutions related to human trafficking. A key initiative in the fight against human trafficking is the development of a national legislative framework that is effective. For this reason the process of legislative reform in South Africa needs to be done to bring domestic law in accordance with anti-trafficking standards set out in the Palermo Protocol to respond to human trafficking.

Key words: South African Government, Human Trafficking, South Africa, European Union, the Palermo Protocol, Tsireledzani, providing knowledge, the establishment of laws